



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu upaya pengamanan yang memadai dan andal;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Wajib Memiliki Sertifikat Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang /..

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2022 dan Nomor PERJ. PKS.26/BSSN/BS/HK.07.02/02/2022 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
8. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat OSD BSSN adalah Sistem Elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara individual maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
10. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
11. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non-elektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

14. Pemilik<sup>1</sup>.



14. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau PNS yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat.
15. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
16. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
20. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
21. Kunci Publik adalah salah satu kunci dan pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
22. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
23. *Reverse-engineering* (rekayasa) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.



Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- b. Meningkatkan keamanan informasi dalam Sistem Elektronik;
- c. Meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan *kenirsangkalan* terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
- c. Tahapan permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. Kewajiban serta larangan terhadap Sistem Elektronik dan Pemilik Sertifikat Elektronik;
- e. Pengawasan dan evaluasi Sertifikat Elektronik; dan
- f. Sanksi administratif.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM  
ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Kebijakan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh OP.
- (2) Petugas OP merupakan pegawai Dinas yang ditunjuk oleh Bupati dan telah memiliki Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
- (3) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - b. Melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - c. Membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - d. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - e. Melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik antara lain meliputi hak dan kewajiban serta prosedur pengajuan keluhan;
  - f. Melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
  - g. Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (5) Apabila petugas OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OP dapat dilaporkan ke BSrE

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. Pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. Pencabutan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.

- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Setiap PNS yang menandatangani dan/atau yang mempunyai otorisasi menerbitkan dokumen elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan Informasi.

#### Pasal 10

- Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diperlukan dalam tugas kedinasan yang meliputi:
- a. Pembuatan dan pengiriman dokumen melalui *e-mail* kedinasan;
  - b. Pembuatan dokumen secara elektronik; dan
  - c. Pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

### BAB IV

#### PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 11

- Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik meliputi:
- a. Tanda Tangan Elektronik;
  - b. Pengamanan dokumen elektronik;
  - c. Pengamanan surat elektronik (*e-mail*); dan
  - d. Pengamanan web.

#### Pasal 12

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan.
- (2) Tanda tangan elektronik yang dibutuhkan pada dokumen elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat.



### Pasal 13

Pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa layanan pengamanan dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

### Pasal 14

Pengamanan surat elektronik (*e-mail*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa layanan perlindungan email untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

### Pasal 15

Pengamanan web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa layanan pengamanan pada sistem aplikasi atau sistem informasi milik Pemerintah Daerah.

## BAB V

### TAHAPAN PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

##### Permohonan Sertifikat Elektronik

### Pasal 16

Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui OP sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

- (1) Pemohon Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
  - b. surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah kepada dinas untuk pendaftaran Sertifikat Elektronik;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
  - d. pas foto;
  - e. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir; dan
  - f. *e-mail* pejabat atau PNS yang menggunakan domain @minahasa.go.id .
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (3) Surat permohonan dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

##### Penerbitan Sertifikat Elektronik

### Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh pejabat atau PNS melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.

(2) Pemilik...

- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik jika pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak/tidak dapat diakses yang ditandatangani oleh atasan langsung.

### Bagian Ketiga Pembaruan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

### Bagian Keempat Pencabutan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSRé berdasarkan evaluasi BSRé dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan pemilik Sertifikat Elektronik, surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh OP kepada BSRé.
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSRé tidak dapat digunakan kembali.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KEWAJIBAN SERTA LARANGAN  
TERHADAP PEMILIK  
SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. Memastikan semua informasi yang diberikan ke OP adalah benar;
- b. Mengikuti saran dan rekomendasi OP terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- c. Mempromosikan layanan Sertifikat Elektronik kepada unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dan masyarakat;
- d. Mencantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
- e. Mencantumkan Informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE;
- f. Memberikan dukungan kepada OP dan BSrE dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh pengguna;
- g. Melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- h. Tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- i. Mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan Informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- j. Melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- k. Tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *Reverse Engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
- l. Bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. Mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. Mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. Menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada OP jika:

1. Pemilik/



1. Pemilik Sertifikat Elektronik mengetahui bahwa data Sertifikat Elektronik telah diretas; atau
  2. Keadaan yang diketahui oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. Menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

#### Pasal 23

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi oleh OP berupa pencabutan Sertifikat Elektronik secara sepihak dan dapat mengajukan permohonan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Sertifikat Elektronik dicabut.

### BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 25

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara;
  - c. pemutusan akses; dan/atau
  - d. dikeluarkan dari daftar pengguna.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Penyedia layanan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga terkait; dan
- (5) Penenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

FRITS ROBERT MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 65  
TANGGAL : 7 JUNI 2022  
TENTANG : PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

---

A. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Kepada ;

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini .

1. Nama lengkap .....
2. NIP .....
3. NIK KTP/ EKTP .....
4. Pangkat/ Gol. Ruang .....
5. Jabatan .....
6. Instansi .....
7. Unit Kerja .....
8. Nomor Telp .....
9. Email Individu .....@minahasa.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

- a. Tanda Tangan Elektronik
- b. Pengamanan Dokumen Elektronik
- c. Pengamanan Email
- d. Pengamanan Web

Dengan ini saya menyatakan bahwa .

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan  
Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka  
saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Tondano  
Pemohon

(Nama Jelas)  
NIP



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 65  
TANGGAL : 7 JUNI 2022  
TENTANG : PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

---

B. Surat Rekomendasi Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Kepada

Yth. Kepala Dinas

Saya yang bertanda tangan dibawah ini .

1. Nama lengkap .....
2. NIP .....
- a. NIK KTP/ EKTP .....
3. Pangkat/ Gol. Ruang .....
4. Jabatan .....
5. Instansi .....
6. Unit Kerja .....
7. Nomor Telp .....
8. Email Individu .....@minahasa.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pejabat/PNS sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tondano  
Pemohon

(Nama Jelas)  
NIP

BUPATI MINAHASA



ROYKE OCTAVIAN RORING